



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 1991
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

: bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan pembukaan dan penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembina Madrasah swasta disekitarnya.

- at : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1991;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama No 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.

hatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-387/I/91 tanggal 6 Mei 1991.

• M E M U T U S K A N

- apkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.
na : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

a : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;

ga : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;

mpat : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;

ima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

nam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 378 buah menjadi 442 buah, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 430 buah menjadi 452 buah dan jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 167 buah menjadi 201 buah;

uh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;

elapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggall : 11 Juli 1991



embusan :

- Menko KESRA di Jakarta;
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- Menteri Keuangan di Jakarta;
- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
- Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
- Sekjen/Para Dirjen/Irjen/Kabulitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
- Para Gubernur KDH Tk I di seluruh Indonesia;
- Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kapuslitbang Agama /Sekretaris/ Kapusdiklat Pegawai di Lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
- Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/ setingkat diseluruh Indonesia;
- Para Kepala Kantor Dep.Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
- Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
- Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

No. : WC/6-6 /PP.03.2/0576/86

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan
inti Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan
Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. N a m a : MI ALMANAR
2. Alamat Jalan : KDKDE
Desa : LAPPA
Kecamatan : SINJAI UTARA
Kabupaten : SINJAI
Propinsi : SULAWESI SELATAN
3. Didirikan pada : THN 1976
Oleh : MASYARAKAT

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan
hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan
dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian
persamaan madrasah negeri.

Ujung Pandang, 1 DESEMBER 1986

